

Pendidikan Islam Indonesia dan Tantangan Globalisasi^{*)}

Peluang dan Tantangan

Oleh Azyumardi Azra

Rektor Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta

Tema "Rethinking Islam", khususnya dalam kaitan dengan tantangan globalisasi, menurut saya sangat penting. Pembicaraan tentang "tantangan pendidikan agama perguruan tinggi di era globalisasi" tidak bisa dilihat hanya dalam konteks pendidikan agama di lembaga pendidikan tertentu, tetapi juga lebih penting lagi dalam konteks pendidikan Islam, dan bahkan pendidikan nasional secara keseluruhan, baik dalam perjalanan sejarah maupun dinamika pendidikan Islam kontemporer, tantangan-tantangan nasional dan global yang dihadapi pendidikan semakin kompleks.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi pendidikan Islam secara keseluruhan, maka tulisan ini membahas pendidikan agama dalam perspektif lebih makro, atau pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional dan tantangan globalisasi. Tantangan yang dihadapi pendidikan Islam seperti juga pendidikan nasional, tidak hanya sekadar mentransmisikan berbagai pelajaran kepada peserta didik, tetapi juga persoalan pentingnya mengembangkan pendidikan Islam yang lebih

berkualitas bagi anak-anak bangsa. Hal ini supaya mereka memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage* atau *competitive edge*) dalam era globalisasi di masa kini dan mendatang.

Masa satu dasawarsa terakhir, sesungguhnya masa yang penuh peluang dan sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia khususnya. Peluang, karena dalam masa-masa inilah kita menyaksikan meningkatnya "*new attachment*" kepada Islam di kalangan masyarakat muslim. Meningkatnya kecintaan kepada Islam seperti ini, membuat banyak kalangan orangtua, khususnya kalangan "kelas menengah" muslim yang tengah tumbuh (*muslim rising middle class*), semakin berusaha mendapatkan pendidikan Islam yang berkualitas bagi anak-anak mereka. Keinginan mereka pada dasarnya untuk mendapatkan pendidikan umum Islam yang berkualitas tinggi, di mana peserta didik tidak hanya bergumul dengan ilmu-ilmu yang penting untuk kehidupan masa kini, tetapi juga ilmu-ilmu dan amal Islam.

Sedangkan kontroversi di sekitar RUU Sisdiknas yang diundangkan

^{*)} Tulisan ini telah dipresentasikan pada seminar "*Rethinking Islam UII*" yang diadakan Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia (PSI-UII) bekerjasama dengan The Asia Foundation tanggal 30 September 2003

pada 8 Juli 2003 lalu, membuktikan bahwa tantangan terhadap pembinaan peserta didik yang unggul dalam iptek dan imtaq masih sangat kuat. Pergulatan dan pengumpulan nampaknya akan terus berlanjut. Jika kaum Muslimin mau mengambil hikmah dari kontroversi itu, tantangan yang harus dijawab adalah supaya segera mengakselerasikan pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas dalam setiap jenjangnya, sejak dari Madrasah Ibtidaiyah sampai perguruan tinggi Islam seperti UIN, STAIN, dan PTAIS seperti STAIMUS; dari SD Islam sampai ke perguruan tinggi umum Islam, seperti UII, Universitas Muhammadiyah, dan lain-lain. Bahkan tantangan itu juga harus dijawab oleh pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya.

Pendidikan Islam dalam Sejarah

Meski pendidikan Islam merupakan pendidikan yang sesungguhnya universal dan merakyat bagi masyarakat muslim Indonesia, secara historis bagian terbesar sejarah pendidikan Islam adalah sejarah tentang keterpinggiran dan marginalisasi. Dalam masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam yang terpusat pada pesantren, surau, dayah, dan lembaga-lembaga pendidikan lain semacamnya, yang terutama berkembang luas sejak abad 19, bahkan sengaja menguzlahkan diri dari kekuasaan kolonial. Uzlah ke dalam lembaga pendidikan ini bahkan merupakan bentuk perlawanan secara diam (*silent opposition*) terhadap kolonialisme Belanda.

Sebagai kontras, pada saat yang sama juga lahir pendidikan missionaris yang berkembang pesat, karena selain

didukung gereja, juga secara langsung atau tidak langsung juga mendapat berbagai fasilitas dari pemerintah kolonial Belanda. Hasilnya, jika lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini kemudian memiliki mutu pendidikan yang lebih baik, maka hal itu tidaklah mengherankan. Secara kelembagaan maupun tradisi kependidikan, lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini telah berusia dan berpengalaman begitu panjang, jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan Islam yang memiliki orientasi keunggulan seperti sekolah-sekolah Islam semacam al-Azhar, al-Izhar, Madania, Insan Cendekia, Muthahhari dan lain-lain, yang baru berkembang baik pada dasawarsa 1990an. Oleh karena itu, sekolah-sekolah Kristen memang memiliki *headstart* yang sangat jauh dan lembaga-lembaga pendidikan Islam "unggulan" tersebut pada dasarnya merupakan "*very late starter*", dan dengan demikian harus berusaha mati-matian untuk mengejar yang memiliki *headstart* dan merupakan "*early starter*".

Kembali kepada sejarah pendidikan Islam, sejak awal kemerdekaan, pendidikan Islam tetap berada di pinggiran. Keadaan ini terus berlanjut sepanjang sisa dasawarsa 1950-an dan bahkan berlanjut sampai dasawarsa 1960-an. Ini sejalan dengan situasi Indonesia sebagai wilayah yang penuh gejolak, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam. Dasawarsa 1950-an ditandai dengan pertarungan politik dan ideologi sebagai akibat dari sistem multi partai. Dalam hal ini, partai-partai Islam gagal dalam mewujudkan keunggulannya dalam Pemilu 1955.

Selanjutnya adalah meningkatnya kekuasaan dan dominasi Presiden Soekarno, yang dalam banyak hal menimbulkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi berbagai aspek kehidupan kaum muslimin, khususnya dalam bidang pendidikan.

Sekitar 20 tahun pertama masa kekuasaan Orde Baru, hubungan yang kurang mulus antara umat Islam dengan pemerintah Presiden Soeharto membuat lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak dari pesantren, madrasah dan sekolah-sekolah Islam tetap berada di pinggiran. Meski demikian, sejak tahun 1970-an, sebagai konsekuensi dari *developmentalism* Orde Baru, madrasah dan pesantren juga mulai mengalami modernisasi, terutama sejak H.A. Mukti Ali menjabat sebagai Menteri Agama. *Entry point* modernisasi madrasah dan pesantren juga mulai adalah SKB Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K, dan Menteri Dalam Negeri) No. 6 Tahun 1975 yang menggariskan agar madrasah, baik negeri maupun swasta, pada semua jenjang sama posisinya dengan sekolah umum dan untuk itu, kurikulum madrasah haruslah 70 persen pelajaran umum dan 30 persen pelajaran agama (Muhanif 1998:313-314).

SKB Tiga Menteri ini merupakan salah satu tonggak terpenting dalam integrasi pendidikan Islam ke dalam *mainstream* pendidikan nasional, dan sekaligus peningkatan kualitas SDM yang belajar pada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lebih jauh lagi, kebijakan Tiga Menteri ini pada hakikatnya merupakan langkah awal bagi "reintegrasi" ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dalam lembaga-

lembaga pendidikan Islam.

Meski kebijakan Tiga Menteri ini semula mendapat tantangan keras dari kalangan pengelola pendidikan Islam, terutama pesantren dan madrasah; tetapi gelindingan modernisasi itu bagi madrasah dan pesantren sudah tidak bisa dimundurkan lagi. Dalam gelindingan modernisasi itu, madrasah dan pesantren berhadapan dengan "krisis identitas" yang memang sejak semula sudah dikhawatirkan mereka yang menentang kebijakan tersebut. Ketetapan muatan pelajaran umum yang begitu besar, pada gilirannya dapat menghilangkan misi, substansi, dan karakter pendidikan Islam itu sendiri. Pergulatan identitas ini masih terus berlanjut sampai sekarang ini.

Sistem pendidikan Islam sering sekali masih bergulat di antara "*academic expectation*", harapan untuk keunggulan akademis dan mutu pendidikan sebagai lembaga pendidikan dengan "*social expectation*", harapan sosial umat Islam bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam memikul tugas pembinaan anak-anak umat sebagai lembaga dakwah (ef Azra 1999a, 1999b). Tetapi, sekali lagi modernisasi pendidikan Islam khususnya madrasah dan pesantren, nampaknya sudah menjadi keharusan sejarah. Modernisasi itu bahkan dikukuhkan dengan UU nomor 2 tahun 1989 tentang SPN dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang selain secara umum mengakui sistem pendidikan Islam, juga menetapkan bahwa madrasah ekuivalen dengan sekolah-sekolah umum.

Madrasah pada dasarnya adalah "sekolah umum" yang memiliki ciri keagamaan (Islam). Tetapi, bagaimana

perumusan "ciri", "nuansa", atau "karakter" Islam itu, sampai sekarang ini masih merupakan agenda yang belum terselesaikan secara tuntas. Namun dengan perkembangan status yang semakin kuat, situasi sosiologis umat Islam sepanjang dasawarsa 1990-an seperti diisyaratkan di atas, membuktikan peluang yang lebih besar bagi munculnya eksperimen-eksperimen baru dalam pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitasnya. Sejak dasawarsa terakhir abad 20 tersebut, muncullah sekolah-sekolah Islam swasta yang dalam perkembangannya disebut sebagai "sekolah Islam plus", "sekolah Islam unggulan", dan bahkan "sekolah elit Islam/Muslim", seperti sekolah Islam al-Azhar, al-Izhar, Muthahhari, Insan Cendekia, Madania, Dwiwarna, dan lain-lainnya.

Seperti yang saya kemukakan (Azra 1999:72ff), sekolah-sekolah Islam ini disebut "elit", "unggulan" atau "plus" karena beberapa alasan; *pertama*, sekolah-sekolah ini menerima siswa-siswanya secara sangat kompetitif, baik dari segi kemampuan akademis maupun keuangan; *kedua*, guru-guru yang mengajar juga diterima melalui penyaringan dan seleksi yang sangat kompetitif; *ketiga*, sekolah-sekolah ini memiliki berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang jauh lebih baik dan lebih lengkap dibandingkan sekolah-sekolah Islam, madrasah dan bahkan sekolah-sekolah negeri lainnya. Dengan berbagai latar belakang seperti ini, tidak heran, kalau kemudian para siswanya juga memiliki kualitas lebih baik dan lebih unggul, meski ranking nasional siswa-siswa terbaik masih didominasi sekolah-

sekolah Kristen.

Kini, sementara proses modernisasi pendidikan Islam dan kebangkitan sekolah unggulan Islam masih jauh dari selesai, tantangan-tantangan baru yang bersifat global telah hadir pula. Tantangan-tantangan global itu dalam bentuk globalisasi dan "globalisme", tidak hanya dalam bidang ekonomi, politik dan informasi, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Pendidikan Islam, khususnya pesantren sebagai lembaga pendidikan, juga tidak luput dari tantangan globalisasi itu. Oleh karena itu, tampak penting bagi kita memahami apa sebenarnya "globalisasi" itu dan tantangan apa yang dihadapkannya terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam dan bagaimana lembaga pendidikan Islam seharusnya merespons tantangan globalisasi tersebut.

Globalisasi dan Dunia Pendidikan

Proses *globalisasi* yang terus menemukan momentumnya sejak dua dasawarsa menjelang milenium baru, telah memunculkan wacana baru dalam berbagai lapangan kehidupan seperti; literatur akademik, media massa, forum-forum seminar, diskusi, dan pembahasan dalam berbagai lembaga. Penggunaan istilah globalisasi semakin meluas termasuk di Indonesia; dan penggunaan istilah lain seperti *kesejagatan* tidak cukup representatif untuk menampung semua makna dan nuansa yang tercakup dalam istilah "globalisasi" tersebut.

Globalisasi adalah kata yang digunakan untuk mengacu kepada "bersatunya" berbagai negara dalam globe menjadi satu entitas (Mohamad

2002:13). Secara istilah globalisasi berarti "perubahan-perubahan struktural dalam seluruh kehidupan negara bangsa yang mempengaruhi fundamen-fundamen dasar pengaturan hubungan antar manusia, organisasi-organisasi sosial, dan pandangan-pandangan dunia" (al-Robaie 2002:7).

Perubahan-perubahan struktural dan perkembangan yang mendorong momentum bagi globalisasi tidak ragu lagi bermula dalam lapangan ekonomi dan teknologi. Setelah itu segera mengimbas ke dalam bidang politik, sosial, budaya, gaya hidup dan lain-lain. Sejumlah perubahan struktural dan perkembangan utama tersebut, antara lain, adalah:

Pertama, pertumbuhan yang cepat dalam perdagangan internasional dan keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan ketergantungan antar negara yang pada dasarnya dikuasai perusahaan-perusahaan multi-nasional (*Multi-National Corporations/MNCs*) yang terus menguat. Dengan kemampuan keuangannya, MNCs mampu melakukan riset dan pengembangan dalam produk-produk baru, sehingga dapat selalu meningkatkan daya saingnya. Pada saat yang sama terjadi pertumbuhan perdagangan internasional dan integrasi pasar yang cepat, dengan pergerakan keuangan secara spekulatif dan dalam jumlah sangat besar sehingga menciptakan "*financial bubble*" (buih keuangan). Sekarang ini, sekitar 2 triliun US dollar setiap hari beredar di seluruh dunia dari jumlah itu hanya 10 persen saja yang riil, selebihnya adalah "uang panas" (*hot money*). Akibatnya, ekonomi negara-negara berkembang, seperti Indonesia, menjadi semakin

rawan dan rentan terhadap perubahan langkah-langkah dan permainan spekulasi finansial global, seperti George Soros.

Dalam globalisasi perdagangan dan keuangan ini, tidak ada negara muslim yang mampu menjadi "pemain". Sebaliknya, kebanyakan mereka terperangkap dalam jaringan ekonomi global, tergantung sepenuhnya pada pasar dunia baik ekspor maupun impor. Lebih jauh, struktur produksi dan produktivitas ekonomi di negara-negara muslim tidak memenuhi standar internasional. Keputusan dan kebijakan ekonomi sangat sentralistik dengan kebebasan yang sangat terbatas pada usaha swasta untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi. Kebijakan dan praktik-praktik KKN menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang membuat seluruh sektor ekonomi dan industri menjadi tidak kompetitif.

Kedua, peningkatan utang dan ketergantungan negara-negara berkembang, yang sebagian besarnya merupakan negara-negara Muslim, pada pasar keuangan internasional. Utang luar negeri negara-negara berkembang meningkat dari US \$ 630 milyar pada 1980 menjadi US\$2,6 triliun pada 1998, sekitar 40 persen dari total GDP mereka secara keseluruhan. Beban utang yang demikian berat menimbulkan kesulitan-kesulitan yang sangat parah bagi negara-negara tersebut untuk melakukan pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Lebih jauh, utang dan kesulitan keuangan itu meningkatkan penanaman modal asing secara langsung (PMA). Pada tahun 2001

desentralistik (otonom); kebijakan yang *bottom up*; orientasi pendidikan holistik untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya (multikulturalisme), menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum; peningkatan peran serta masyarakat secara kultural dan hukum; peningkatan peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif; dan pemberdayaan institusi masyarakat; keluarga, LSM, pesantren, lembaga-lembaga pendidikan lainnya, dan dunia usaha.

Selanjutnya paradigma baru pendidikan nasional itu menggariskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam arah baru pengembangan pendidikan nasional, yaitu: (1) Kesetaraan perlakuan sektor pendidikan dengan sektor lain; (2) Pendidikan berorientasi rekonstruksi sosial; (3) Pendidikan dalam rangka pemberdayaan bangsa; (4) Pemberdayaan infrastruktur sosial untuk kemajuan pendidikan nasional; (5) Pembentukan kemandirian dan keberdayaan untuk mencapai keunggulan; (6) Penciptaan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya toleransi dan konsensus dalam kemajemukan; (7) Perencanaan terpadu secara horizontal (antar sektor) dan vertikal (antar jenjang); (8) Pendidikan berorientasi peserta didik; (9) Pendidikan multikultural; dan (10) Pendidikan dengan perspektif global.

Respons Pendidikan Islam

Tantangan global dan globalisasi yang terus menemukan momentumnya sejak akhir milenium lalu, yang dikemukakan secara singkat di atas, jelas jauh lebih kompleks daripada

tantangan-tantangan yang pernah dihadapi lembaga pendidikan Islam di masa silam (Cf Hasan 1988:114). Kompleksitas tantangan itu menjadi lebih rumit lagi, ketika kita harus mengakui, bahwa secara internal lembaga-lembaga pendidikan Islam umumnya masih menghadapi berbagai masalah yang masih belum terselesaikan sampai sekarang ini.

Tantangan-tantangan dan masalah-masalah internal pendidikan Islam pasca modernisasi dan tantangan globalisasi pada hari ini dan masa depan, secara umum adalah sebagai berikut: Harapan pertama, jenis pendidikan yang dipilih dan dilaksanakan. Dengan terjadinya perubahan-perubahan kebijakan dan politik pendidikan sejak tahun 1970-an dan peluang-peluang baru seperti diisyaratkan dalam paradigma baru pendidikan nasional seperti yang dikemukakan di atas. Kini lembaga-lembaga pendidikan Islam memiliki peluang dan sekaligus tantangan berkenaan dengan jenis pendidikan yang dapat dipilih dan diselenggarakan, yang setidaknya-tidaknya kini menyediakan empat pilihan:

(1) Pendidikan yang berpusat pada *tafaqquh fi al-din*, seperti yang ada dalam tradisi pesantren pada masa pra-modernisasi (pesantren *salafiyyah*), dengan kurikulum yang hampir sepenuhnya ilmu agama. Di tengah arus modernisasi pesantren, belakangan terdapat kecenderungan sejumlah pesantren untuk memper-tahankan atau bahkan kembali kepada karakter Salafiyyahnya. (2) Pendidikan madrasah yang mengikuti kurikulum Diknas dan Depag. Madrasah semula merupakan "pendidikan agama plus umum", tetapi dengan ekuivalensi

seperti digariskan UU SPN 1989 dan UU Sisdiknas 2003, pada dasarnya adalah "sekolah umum berciri agama". (3) Sekolah Islam "plus" atau "unggulan" yang mengikuti kurikulum Diknas, yang pada dasarnya adalah "pendidikan umum plus agama". (4) Pendidikan keterampilan (*vocational training*), apakah mengikuti model "STM" atau MA/SMU keterampilan.

Keempat jenis pilihan ini dapat dilaksanakan oleh satu lembaga pendidikan Islam tertentu, atau sebagian besar atau secara keseluruhan dalam satu kelembagaan pesantren tertentu (pesantren menjadi semacam "*holding company*"). Pilihan-pilihan ini secara implisit mengakomodasi hampir keseluruhan harapan masyarakat secara sekaligus kepada pendidikan Islam. Harapan pertama dan utama adalah agar lembaga-lembaga pendidikan Islam secara keseluruhan tetap menjalankan peran sangat krusialnya dalam tiga hal pokok: *Pertama*, transmisi ilmu-ilmu dan pengetahuan Islam (*transmission of Islamic knowledge*). *Kedua*, pemeliharaan tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*). *Ketiga*, reproduksi (calon-calon) ulama (*reproduction of 'ulama'*).

Harapan kedua adalah agar para peserta didik tidak hanya mengetahui ilmu agama, tetapi juga ilmu umum, atau sebaliknya tidak hanya menguasai pengetahuan umum, tetapi juga unggul dalam ilmu agama dan dengan demikian, dapat melakukan mobilitas pendidikan. Sedangkan harapan ketiga, agar para anak didik memiliki keterampilan, keahlian atau *lifeskills* khususnya dalam bidang-bidang sains dan teknologi yang menjadi karakter dan ciri masa

globalisasi. Hal ini pada gilirannya akan membuat mereka memiliki dasar-dasar "*competitive advantage*" dalam lapangan kerja, sebagaimana dituntut di alam globalisasi.

Pengembangan "*competitive advantage*" atau "*competitive edge*" di dunia pesantren jelas bukanlah hal yang mudah. Pengembangan itu, bukan hanya memerlukan penyediaan SDM guru yang *qualified*, laboratorium/bengkel kerja dan *hardware* lain, tetapi juga perubahan sikap teologis dan budaya. Bukan rahasia lagi, bahwa paham teologis yang dominan pada kalangan umat Islam masih cenderung meminggirkan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan sains dan teknologi, karena secara epistemologis dianggap tidak atau kurang sah, karena sains dan teknologi merupakan produk rasio dan pengujian empiris. Lebih jauh, budaya sains dan teknologi masih kurang mendapat tempat dalam masyarakat kita umumnya, tingkat melek, apalagi seperti budaya komputer, bisa diduga, masih sangat rendah dalam masyarakat kita umumnya, *wa bil-khusus* dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam umumnya.

Tetapi, sekali lagi, mengambil keseluruhan pilihan jenis pendidikan ini jelas mengandung berbagai kesulitan dan dilemma tertentu bagi lembaga pendidikan yang memiliki pretensi ke arah tersebut. Kesulitan itu terletak bukan hanya pada keterbatasan kapasitas kelembagaan institusi-institusi pendidikan Islam umumnya, tetapi juga karena masih lemahnya SDM yang *qualified* dalam proses pembelajaran, dan keterbatasan-keterbatasan lainnya. Oleh karena itu, langkah yang paling realistis

adalah mengambil satu²¹ atau dua pilihan itu, sementara sedikit banyak berusaha mengakomodasi pilihan-pilihan lainnya.

Persoalan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan masalah identitas diri lembaga pendidikan Islam tertentu. Pada satu segi, pengakuan atas dan penyetaraan pendidikan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam telah membuka berbagai peluang bagi penyelenggaraan berbagai jenis pendidikan-pendidikan Islam. Tetapi penentuan pilihan-pilihan juga sangat mungkin akan mengorbankan identitas pendidikan Islam itu sendiri sebagaimana telah terpatrit di dalam masyarakat. Di sini terjadi "perbenturan" antara "*social expectations*" dengan "*academic expectations*" yang disinggung di atas, dan hal ini terlihat khususnya pada pesantren. Keterlibatan pesantren dalam program-program non-kependidikan seperti pengembangan pesantren sebagai pusat koperasi, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi pedesaan, pusat pengembangan pertanian dan peternakan, pusat penyelamatan lingkungan hidup, pusat pengembangan HAM dan demokrasi, dan sebagainya juga dapat mengaburkan identitas pesantren.

Lebih jauh, paradigma baru pendidikan nasional juga sangat menekankan kenyataan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam umumnya merupakan "pendidikan berbasis masyarakat" (*community-based education*) selama berabad-abad. Pada satu segi, pengakuan ini merupakan perkembangan yang positif, khususnya menyangkut

eksistensi pendidikan Islam itu sendiri. Tetapi, pada segi lain, pengakuan itu secara implisit menuntut peran lebih besar masyarakat dalam pendidikan Islam. Masyarakat kini dituntut tidak hanya mendirikan bangunan fisik dan perangkat-perangkat pokok lembaga pendidikan Islam, tetapi lebih-lebih lagi dalam mengembangkannya menjadi pendidikan yang berkualitas (*quality education*) untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki "keunggulan kompetitif tersebut". Di sini, masyarakat pendukung pendidikan Islam diharapkan dapat menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung yang lebih memadai bagi terselenggaranya pendidikan yang mampu mendorong penanaman dasar-dasar keunggulan kompetitif tersebut. Selanjutnya, penguatan kelembagaan dan manajemen. Perubahan-perubahan kebijakan pendidikan nasional misalnya yang menekankan pada peran lembaga pendidikan Islam sebagai "*community-based education*" dan tantangan-tantangan global mengharuskan lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat dan memberdayakan kelembagaannya. UU yayasan yang baru juga menghendaki lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk meninjau dan merumuskan kembali kelembagaannya dan hubungannya dengan para pelaksana kependidikan; madrasah dan atau sekolah. Kelembagaan pendidikan Islam haruslah bertitik tolak pada prinsip-prinsip kemandirian (otonomi), profesionalitas, akuntabilitas dan kredibilitas.

Dalam mewujudkan *quality education*, yayasan (atau bahkan Perseroan Terbatas) yang menjadi

pemilik lembaga-lembaga pendidikan seyogyanya memberikan ruang gerak lebih besar kepada para pelaksana pendidikan, khususnya kepala madrasah atau kepala sekolah agar : *Pertama*, dapat mengorganisasi dan memberdayakan sumber daya yang ada untuk memberikan dukungan yang memadai bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang maksimal, bahwa pengajaran yang cukup, dan pemeliharaan fasilitas yang baik. *Kedua*, dapat berkomunikasi secara teratur dengan pemilik lembaga (yayasan), guru, staf, orangtua, siswa, masyarakat, dan pemerintah setempat.

Selanjutnya, pesantren sudah waktunya dikelola dengan manajemen modern sehingga pendidikan yang diselenggarakannya dapat lebih efisien dan efektif. Prinsip-prinsip manajemen modern seperti "total quality management" (TQM) atau "corporate good governance" yang sudah mulai diterapkan pada sementara lembaga-lembaga pendidikan lain, agaknya dapat pula mulai dikaji di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Penutup

Meski lembaga-lembaga pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan, seperti dikemukakan di atas, peluang bagi pendidikan Islam yang jelas masih tetap besar. Situasi sosiologis umat Islam Indonesia, yang setidak-tidaknya dalam dua dasawarsa terakhir menemukan "new attachment" kepada Islam merupakan modal yang sangat berharga bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Fenomena kemunculan "sekolah Islam

unggulan", "pesantren urban", dan sebagainya, merefleksikan bahwa pendidikan Islam dalam bentuk sekolah Islam, madrasah, pesantren atau yang bermodel pesantren (*pesantren-based Islamic education*) tetap mendapat tempat yang semakin kuat. Kini tinggal bagi pendidikan Islam itu sendiri untuk memberdayakan dirinya untuk mampu benar-benar menjadi "pendidikan alternatif" yang memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi arus globalisasi.***

Sumber Bacaan

Azra, Azyumardi, 2002, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Kompas

-----, 1999, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, Bagian Pertama, Pendidikan Islam: Tradisi dan Tantangan Milenium Baru, khususnya "Kebangkitan Sekolah Elite Muslim: Pola Baru "Santrinisasi".

-----, 1999, *Esei-esai Intelektual Muslim & Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos.

Burbules, N. & B. Torres (eds.), 2001, *Globalization and Educational Policy*, New York: Routledge.

Camilleri, Joseph A & Chandra Muzaffar, 1998, *Globalization: The Perspectives and Experiences of the Religious Traditions of Asia Pasific*, Petaling Jaya: International Movement for a Just World.

- Green, Andy, 1997, *Education, Globalization and the Nation State*, London. Macmillan.
- Hing, Lee Kam, 1995, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965*, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, khususnya Chapter 4, "Education and Religion".
- Jalal, Fasli & Dedi Supriadi (eds.), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita.
- Kunio, Yoshihara, 2001, *Globalization & National Identity*, Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Mohamad, Mahathir, 2002, *Globalization and the new Realities*, Dubang Jaya: Pelanduk Publications, khususnya bab-bab: "Islam and Globalisation", "The Impact of Globalisation on the Islamic World", "The Challenge of Globalisation".
- Munhanif, Ali, 1998, "Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik Keagamaan Orde Baru", dalam Azyumardi dan Saiful Umam (eds), IAIN Jakarta dan Litbang Depag RI.
- Al-Roubaie, Amer, 2002, *Globalization and the Muslim World*, Shah Alam: Malita Jaya Publishing House.
- Tilaar, HAR, 2002a, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: Grasindo, khususnya Bab I Demokratisasi, Bab II Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Bab II Globalisasi.
- Tilaar, HAR, 2002b, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, khususnya Bab I Pengembangan SDM dalam Era Persaingan Bebas.